

UPAYA DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIMEULUE

Saumi Rahmadani^{1*}, Fadli Afriandi²

^{1,2} Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

*Korespondensi : saumirahmadani1@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang cepat juga menjadi tantangan dalam mengelola sumber daya dan memastikan kesejahteraan bagi semua warga, sementara ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial masih merupakan masalah penting yang perlu ditangani. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simeulue pada tahun 2022 mencapai 17.863 orang, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode survei dan menggunakan teknik yang saling berkaitan seperti dokumentasi dan observasi dalam tulisan ini. Menurut hasil penelitian ini, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), pendampingan usaha mandiri, pemberdayaan ekonomi, pembentukan koordinator wilayah, dan peningkatan pelayanan publik yang transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin berhasil melalui program PKH, pendampingan usaha mandiri, pemberdayaan ekonomi, pembentukan koordinator wilayah, dan peningkatan pelayanan publik yang transparan. Program ini efektif, terbukti dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45%, sehingga Dinas Sosial berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kesejahteraan, Kesenjangan, Simeulue, Upaya.

ABSTRACT

Rapid population growth also poses challenges in managing resources and ensuring prosperity for all citizens, while inequality and social disparities are still an issue citizens, while inequality and social disparities are still important issues that need to be addressed. that need to be addressed. The number of poor people in Simeulue District in 2022 reached 17,863 people, according to data collected by the district's Central Statistics Agency (BPS). Statistics (BPS) of the district. The author used a qualitative qualitative approach through a survey method and uses interrelated techniques such as documentation and observation in this paper. such as documentation and observation in this paper. According to the results of the research According to the results of this study, to improve community welfare, the Social Affairs Office applies the Family Hope Program (PKH), independent business assistance, economic empowerment, the formation of regional coordinators, and the improvement of public services. economic empowerment, the establishment of regional coordinators, and the improvement of transparent public services. transparent public services. The research results show that the efforts made by the Social Affairs Office to improve the welfare of the poor have been the poor are successful through the PKH program, independent business assistance, economic empowerment, establishment of regional coordinators, and improvement of

transparent public services. transparent public services. This program is effective, as evidenced by decrease in the poverty rate by 0.45%, so that the Social Services Office succeeded in improving the quality of life of the poor. improving the quality of life of the poor.

Keywords : *Efforts, Inequality, Poverty, Simeulue, Welfare.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, dengan lebih dari 270 juta penduduk. Ini menempatkannya sebagai negara keempat dengan populasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan India (Dwi, 2019). Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, mengelola sumber daya dan memastikan kesejahteraan setiap orang menjadi tantangan. Indonesia memiliki potensi besar, namun juga dihadapkan pada berbagai masalah sosial dan ekonomi. Meningkatnya angka kemiskinan merupakan masalah utama yang harus diatasi, dan ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan besar yang perlu ditangani. Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa banyak penduduk negara masih berada di bawah keterpurukan. Kondisi ini memerlukan upaya serius dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi sangat penting dalam mengatasi masalah ini (Nailufarh, 2010).

Kesejahteraan sosial masyarakat miskin merupakan cerminan dari Pancasila. Keadilan sosial adalah prioritas utama ideologi negara Pancasila. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar semua warga negara, termasuk mereka yang miskin. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat miskin adalah implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila (Natsir et al., 2022). Memastikan kesejahteraan mereka berarti menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan nyata. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan fisik, religius, dan sosial warga negara dipenuhi, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang layak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri (Indriani & Fadhlain, 2022). Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, warga negara dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Jika kesejahteraan sosial mencakup elemen fisik, rohani, dan sosial, maka setiap orang dapat tetap hidup dengan martabat.

Kabupaten Simeulue, yang terletak di Provinsi Aceh, memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, sebanyak 17.863 orang atau 18,37% dari total populasi di wilayah ini hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa hampir satu dari lima penduduk Simeulue berada dalam kondisi miskin. Tingginya angka kemiskinan ini menjadi fokus utama untuk diatasi melalui berbagai program dan kebijakan yang ditargetkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Beberapa indikator utama dari permasalahan ini meliputi jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS,

tingginya ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, serta rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. *Problem statement* ini menyoroti perlunya intervensi yang lebih strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dinas Sosial adalah sebuah instansi pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam menangani berbagai masalah sosial di masyarakat. Selain itu, dinas sosial berperan dalam memerangi kemiskinan. Misalnya, program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Simeulue yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sabarisman, 2015). Dinas Sosial memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Syaefullah et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Simeulue. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif program-program yang telah digunakan oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena alami (Sugiyono, 2016). Pengambilan data dilakukan selama satu bulan, mulai 5 Mei Sampai 7 Juni 2024. Penulis menggunakan teknik yang saling berkaitan seperti

dokumentasi, observasi, dan penulis mengumpulkan data sesuai dengan peristiwa dan media yang digunakan. Sumber data penelitian ini dikumpulkan secara keseluruhan, didistribusikan, dan diverifikasi sebelum menarik kesimpulan. Namun, dilakukan peninjauan ulang terhadap data lapangan untuk memastikan kredibilitasnya.

Wawancara dilakukan dengan informan kunci, yaitu Bapak Ferry Afrizal selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi, laporan tahunan, serta data statistik dari BPS dan Dinas Sosial.

Penulis memilih kantor Dinas Sosial Kabupaten Simeulue berlokasi di Jl. Syariah Sinabang, Desa Ameria Bahagia yang berada di Kecamatan Simeulue Timur, yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Simeulue. Penulis memilih kantor Dinas Sosial Kabupaten Simeulue sebagai tempat penelitian karena itu merupakan pusat kegiatan penanggulangan masalah sosial, termasuk kemiskinan. Lokasi ini memungkinkan akses yang lebih baik untuk data dan interaksi langsung dengan staf Dinas Sosial, memberikan wawasan mendalam tentang upaya-upaya dan tantangan yang dihadapi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema yang muncul, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap hasil penelitian. Dengan informan yang memiliki peran strategis dan pengalaman langsung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin di Kabupaten Simeulue.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Simeulue memfokuskan upayanya pada pemberdayaan masyarakat miskin. Mereka mengadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam berbagai bidang. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat miskin memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Selain itu, Dinas Sosial juga mengenalkan program wirausaha kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan potensi ekonomi mereka. Program wirausaha ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam berwirausaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Dalam upaya meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, Dinas Sosial juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dan meningkatkan potensi ekonomi mereka.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simeulue dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ini merupakan implementasi dari program-program pemerintah yang wajib dilaksanakan. Program-program tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Meskipun beberapa upaya ini dapat

dianggap sebagai inovasi atau pengembangan lebih lanjut oleh Dinas Sosial, mereka tetap berada dalam kerangka program pemerintah yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan kebijakan nasional terkait kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Dinas Sosial Kabupaten Simeulue telah melakukan beberapa hal berikut:

2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (PKH) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan PKH, Dinas Sosial membentuk fasilitator PKH yang bertugas sebagai penjaga dan pengawas program. Fasilitator PKH juga bertugas menentukan penerima PKH yang memenuhi kriteria program. Untuk menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial, digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simeulue. Persyaratan untuk memenuhi syarat sebagai penerima PKH meliputi status warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Data Terpadu (DTKS) dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan berada dalam kondisi sosial ekonomi yang miskin atau rentan, serta memiliki anggota keluarga yang sedang hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan anggota keluarga yang sudah lanjut usia atau menderita disabilitas berat yang berlangsung lama.

Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan informasi kepada peserta PKH tentang pendamping PKH yang akan

mereka terima. Pendamping PKH bertugas membantu peserta PKH dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Pendidikan dan pendampingan ibu hamil dan anak adalah dua komponen utama program pendampingan PKH. Dalam komponen pendidikan, pendamping PKH membantu peserta PKH dalam meningkatkan akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan anak (Rahmawati et al., 2023).

3. Pendampingan Dan Pelatihan Usaha Mandiri

Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui strategi pemerintahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dalam upaya ini, pemerintah berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Beberapa diantaranya adalah pengembangan UMKM yang dimana pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, serta memberikan akses ke pendanaan dan fasilitas lainnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pemberdayaan wanita di Kabupaten Simeulue melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam upaya ini, pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan kepada wanita untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, serta memberikan akses ke pendanaan dan fasilitas lainnya.

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui strategi

pemerintahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dalam upaya ini, pemerintah berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Beberapa diantaranya adalah pengembangan UMKM yang dimana pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, serta memberikan akses ke pendanaan dan fasilitas lainnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pemberdayaan wanita di Kabupaten Simeulue melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam upaya ini, pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan kepada wanita untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, serta memberikan akses ke pendanaan dan fasilitas lainnya.

5. Pembentukan Koordinator Wilayah

Dinas Sosial telah mengambil langkah signifikan dengan membentuk koordinator wilayah di berbagai bidang penting. Salah satu bidang utama yang menjadi fokus adalah kesejahteraan keluarga, di mana upaya dilakukan untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan dukungan yang diperlukan. Bidang lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan anak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas dengan bantuan koordinator khusus. Selain itu, kesejahteraan lanjut usia juga menjadi perhatian khusus karena banyak lansia membutuhkan bantuan dan perhatian ekstra untuk memastikan mereka dapat menikmati masa tua dengan layak dan bermartabat. Tujuan utama dari

pembentukan koordinator ini adalah untuk meningkatkan keadaan umum masyarakat, terutama masyarakat miskin yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik melalui koordinator wilayah ini, diharapkan program-program kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, mempercepat proses penyaluran bantuan, dan memastikan tidak ada yang terlewat dari bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

6. Komitmen

Pemerintah Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang transparan. Transparansi ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue juga fokus pada peningkatan investasi swasta. Investasi tersebut diarahkan ke sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan berkembangnya sektor pertanian dan perikanan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan.

7. Efektifitas Program

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Ferry Afrizal, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, upaya yang dilakukan Dinas Sosial melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan penyaluran dana bantuan PHK telah tepat sasaran, memastikan bantuan tersebut diterima oleh individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, program pendampingan yang telah diterapkan berhasil meningkatkan keterampilan ekonomi masyarakat miskin, termasuk kaum perempuan. Program ini

memberikan pelatihan keterampilan yang membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi mereka. Bapak Ferry Afrizal menilai bahwa sejauh ini, pelaksanaan program dan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin berjalan lancar dan tepat sasaran. Program-program tersebut tidak hanya memberikan hasil yang positif dalam peningkatan keterampilan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. “Saya menilai sejauh ini pelaksanaan program dan penyaluran bantuan – bantuan kepada masyarakat miskin berjalan dengan lancar dan juga tepat pada sasaran. Program – program yang diterapkan juga telah berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat, harapannya dengan meningkatnya keterampilan masyarakat dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka”.

Secara keseluruhan, hasil dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Simeulue dalam implementasi berbagai program telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Terutama, fokus pada peningkatan keterampilan dan potensi ekonomi mereka telah menjadi sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Simeulue pada tahun 2022 yaitu 17.863 orang atau 18,37 kemudian menjadi 17.623 orang atau 17,92% pada tahun 2023, ini berarti angka kemiskinan di Kabupaten Simeulue mengalami penurunan sebesar 0.45% (Irwansah, 2023). Melalui berbagai program yang diterapkan, seperti penyaluran dana bantuan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tepat sasaran dan program pendampingan

yang efektif, Dinas Sosial berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

D. KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), pendampingan usaha mandiri, pemberdayaan ekonomi, pembentukan koordinator wilayah, dan pelayanan publik yang lebih transparan adalah cara upaya Dinas Sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini efektif dan terbukti dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45%, sehingga Dinas Sosial berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- BPS. (2022). *No Title*. BPS. <https://simeuluekab.bps.go.id/>
- Dwi, H. (2019). Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia. *Katadata.Co.Id, April*, 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>
- Indriani, S., & Fadhlain, S. (2022). Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 2408–2416. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5092>
- Irwansah, A. (2023). *BPS: Kemiskinan di Simeulue turun pada 2023*.

ANTARA.

<https://www.antaranews.com/berita/3862917/bps-kemiskinan-di-simeulue-turun-pada-2023>

- Nailufarh, Q. A. (2010). Kesejahteraan Ekonomi Rakyat; Di Antara Harapan Dan Realitas Oleh. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 27–39.
- Natsir, M., Fuadi, F., & Ulya, Z. (2022). Perwujudan Sila Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Aceh. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 80–93. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.281>
- Rahmawati, M., Sukapti, & Abdullah, Z. (2023). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Fasilitator Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. 2.
- Sabarisman, M. (2015). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi. *Sosio Konsepsia*, 4(3), 194–205. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i3.151>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syaefullah, S., Hutabarat, C., NL, R., & GD, D. (2022). Optimalkan Peran Dinas Sosial Melalui Penggunaan Python Untuk Data Mining Pusdatin Kemensos Dalam Pelaksanaan Validasi Dan Verifikasi Dtkd Di Provinsi Maluku. *Explore*, 12(2), 30. <https://doi.org/10.35200/explore.v12i2.605>